

Bahasa Baku dan Sikap terhadap Bahasa Baku (Tinjauan Teoritis dan Deskriptif terhadap Problematika Pembakuan Bahasa Indonesia)

Oleh Tri Astuti¹
(*astutitri7@gmail.com*)

ABSTRAK

Bahasa merupakan sarana komunikasi paling vital di masyarakat. Oleh sebab itu, standardisasi atau pembakuan bahasa dalam suatu masyarakat menduduki peran yang penting, terlebih untuk masyarakat heterogen seperti Indonesia, yang konsekuensinya memunculkan berbagai bahasa dan ragam bahasa. Untuk memudahkan komunikasi dalam masyarakat, perlu dipilih satu variasi atau ragam bahasa yang dapat dijadikan sebagai acuan atau standar pemakaian di masyarakat. Bahasa yang standar atau baku ini akan menduduki posisi yang lebih tinggi dalam skala tata nilai masyarakat pemakai bahasa. Bahasa standar atau baku memiliki ciri *kemantapan dinamis, cendikia, dan keseragaman kaidah*. Persoalan yang terjadi dalam usaha pembakuan/standardisasi bahasa Indonesia, tak terlepas dari pengaruh sikap dan tanggapan para pemakai bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap tuna harga diri, yaitu sikap yang kurang bangga dan sinis dalam menggunakan dan memakai bahasa Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding bahasa sendiri dan memandang sinis terhadap usaha-usaha dalam pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, adanya tanggapan yang beranggapan bahwa masalah kebahasaan Indonesia adalah masalah yang sepele, tidak perlu pembahasan lebih mendalam dalam pemakaiannya karena mereka berargumen dalam penggunaan bahasa '*yang penting tahu maksudnya*'. Hal ini melahirkan kebiasaan di kalangan masyarakat kita bahwa belajar bahasa Indonesia cukup secara alamiah saja. Artinya, mereka belajar dari apa yang nyatanya digunakan tanpa memikirkan apa bentuk bahasa tersebut secara kaidah yang benar, sehingga dalam pemakaian mereka menekankan pada *selera bahasa* daripada *penalaran bahasa*.

Kata kunci: Sikap, Bahasa Baku, dan Pembakuan Bahasa.

A. Pendahuluan

Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Bahasa bukan saja merupakan alat komunikasi, tetapi lebih dari itu, bahasa dapat merupakan alat politis untuk mempersatukan bangsa. Tidak sedikit negara yang mengalami gejolak politik hanya karena perbedaan bahasa atau karena tiadanya bahasa sebagai alat pemersatu. Indonesia, pernah mengalami gejolak politik bahkan pernah mengalami sebagai bangsa terjajah yang cukup lama karena salah satu penyebabnya adalah perbedaan bahasa. Sekalipun pada akhirnya, permasalahan ini dapat diselesaikan, tanpa ada ketegangan politik dan bentrokan politik antarwilayah dengan dipilihnya bahasa Melayu (yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi bahasa Indonesia). Hal ini dikarenakan adanya kesadaran secara sosiolinguistik oleh para pemakai bahasa bahwa bahasa Melayu mempunyai peranan yang lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Keheterogenan itu menyangkut bidang sosial, politik, budaya, suku bangsa, agama, dan juga bahasa. Dalam

¹Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Lubuklinggau

bidang bahasa, sebagai konsekuensinya muncullah berbagai ragam dan variasi bahasa. Untuk memudahkan komunikasi dalam masyarakat dan mempersatukan masyarakat yang heterogen (atau diglosia) tersebut, perlu dipilih satu variasi atau ragam bahasa sebagai acuan dan tolok ukur dalam pemakaian. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkannya Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi “*Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia*”, ini memperkuat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa acuan dan standar untuk komunikasi antarwilayah yang berbeda, baik suku, bangsa, budaya, maupun bahasa.

Selain sebagai alat pemersatu, bahasa juga merupakan sarana penyerap dan pengembang ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa yang sudah mengalami kemajuan dan masuk dalam kategori bangsa maju, pada umumnya mempunyai struktur bahasa yang modern dan mantap. Ini menjadi suatu dasar pemikiran bahwa bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa akan menjadi sarana untuk dapat mengantarkan bangsa dalam membuka wawasannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

Dewasa ini telah digalakkan usaha pengembangan bahasa Indonesia ke arah pemodernan bahasa karena bahasa Indonesia harus dapat dijadikan sebagai bahasa keilmuan. Usaha tersebut ditandai dengan dibentuknya *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* dengan diterbitkannya buku *Kamus Besar bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Sekalipun dua buku tersebut belum membahas tuntas aspek kebahasaan yang diharapkan, namun dengan terbitnya dua buku tersebut mengisyaratkan bahwa untuk kemantapan kedudukan bahasa Indonesia perlu dilakukan pembakuan bahasa, baik dalam bidang ejaan maupun tata bahasanya.

Kita sadari bahwa pembakuan bahasa bukan hanya menyangkut norma bahasa yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa yang dipakai di sekolah atau dunia pendidikan atau kalangan terpelajar, namun juga norma berdasarkan adat pemakaian (*usege*) yang belum dikodifikasi secara resmi, yang umumnya dipakai oleh kalangan media masa atau masyarakat umumnya. Dua norma ini saling bertumpang tindih, di samping berbagi inti bersama, ada norma yang berlaku di sekolah, tetapi tidak diikuti oleh media massa dan masyarakat atau sebaliknya.

Berbicara norma berdasarkan adat pemakaian (*usege*) atau perilaku kebahasaan dalam masyarakat ini akan berkaitan dengan sikap mentalitas para pemakai dan pengguna bahasa. Sikap tuna harga diri, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan latah dalam perilaku berbahasa merupakan penghambat dalam proses pembakuan dan pemodern bahasa Indonesia (Chaer, 2002:17). Hal ini didasarkan pada tanggapan yang beranggapan bahwa masalah

kebahasaan Indonesia adalah masalah yang sepele, tidak perlu pembahasan lebih mendalam dalam pemakaiannya karena mereka berargumen dalam penggunaan bahasa '*yang penting tahu maksudnya*'. Belajar bahasa Indonesia cukup secara alamiah saja. Artinya, mereka belajar dari apa yang nyatanya digunakan tanpa memikirkan apa bentuk bahasa tersebut secara kaidah yang benar, sehingga dalam pemakaian mereka menekankan pada *selera bahasa* daripada *penalaran bahasa*.

B. Pembahasan

1. Konsep dan Pentingnya Pembakuan Bahasa

Bahasa merupakan sarana komunikasi paling vital di masyarakat. Oleh sebab itu, standardisasi atau pembakuan bahasa dalam suatu masyarakat menduduki peran yang penting, terlebih untuk masyarakat heterogen seperti Indonesia, yang konsekuensinya memunculkan berbagai bahasa dan ragam bahasa. Untuk memudahkan komunikasi dalam masyarakat yang diglosia, perlu dipilih satu variasi atau ragam bahasa yang dapat dijadikan sebagai acuan atau standar pemakaian di masyarakat. Bahasa yang standar atau baku ini akan menduduki posisi yang lebih tinggi dalam skala tata nilai masyarakat pemakai bahasa.

Pembakuan atau istilah lainnya, standardisasi menurut Alisyahbana (1985:24) adalah penetapan norma- norma. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa standardisasi bukan hanya soal bahasa, tetapi segala kelakuan kebudayaan manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam suatu masyarakat, akan timbul komunikasi dan saling mengerti apabila kelakuan suatu masyarakat itu berstandar, artinya mempunyai aturan-aturan dan makna-makna tertentu, yang diketahui oleh anggota-anggota masyarakat tersebut, sehingga anggota yang seorang bukan saja bisa mengerti namun juga bisa mereaksi.

Dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*(2010:14), juga dituliskan secara tentatif ada dua norma yang saling tumpang tindih yang perlu diperhatikan dalam pembakuan bahasa. Norma pertama berupa norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa yang diajarkan di sekolah dan yang lain norma yang didasarkan pada adat pemakaian (*usage*) yang belum dikodifikasi secara resmi, yang biasanya dipakai oleh media massa dan masyarakat. Kedua norma ini saling bertumpang tindih karena di samping berbagi inti bersama, ada norma yang berlaku di sekolah, tetapi tidak berlaku di media massa atau masyarakat. Konsep pembakuan bahasa bertujuan menyeimbangkan kedua norma ini sehingga melahirkan aturan kebahasaan yang standar agar terwujud fungsi bahasa baku sebagai kerangka acuan.

Pembakuan bahasa dapat dilakukan terhadap ejaan, lafal, perbendaharaan kata, istilah dan tata bahasa. Penetapan pembakuan ini tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun proses

penetapan bisa dilakukan secara spontan dan juga terencana. Namun, untuk berkembang menuju bahasa yang modern perlu dilakukan pengembangan dan perluasan, sampai akhirnya mencapai persyaratan bahasa baku yang memiliki *kemantapan dinamis, cendikia, dan keseragaman kaidah*.

2. Ciri dan Fungsi Bahasa Baku

Sebagaimana diungkap di atas, ciri bahasa yang baku atau standar adalah memiliki sifat *kemantapan dinamis, cendikia, dan keseragaman kaidah*. Maksud dari memiliki sifat *kemantapan dinamis* adalah bahwa bahasa itu memiliki kaidah atau aturan yang tetap, tidak dapat berubah setiap saat. Namun di sisi lain, kemantapan itu memiliki sifat yang tidak kaku, tetapi cukup luwes untuk memungkinkan menerima perubahan yang bersistem. Misalnya, di bidang peristilahan muncul istilah *pelanggan* 'orang yang berlangganan' dan *langganan* 'orang yang tetap menjual barang kepada orang lain; hal menerima terbitan atau jasa atas pesanan yang teratur'.

Ciri kedua adalah *kecendekiaan*, maksudnya dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ciri kedua ini sangat penting dalam pengenalan ilmu dan teknologi modern, yang kini umumnya masih bersumber pada bahasa asing. Oleh sebab itu, untuk mencapai ciri kedua ini, bahasa Indonesia banyak menyerap unsur serapan dari bahasa asing. Namun, bukan berarti ciri kedua ini sebagai upaya pembaratan bahasa.

Ciri yang terakhir yaitu bahasa baku adalah *keseragaman kaidah*. Baku atau standar berpraaanggapan adanya keseragaman. Oleh sebab itu, proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses *penyeragaman* kaidah. Namun, bukan bermakna penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa.

Pembakuan bahasa atau bahasa baku/standar akan menghasilkan suatu pembelajaran bahasa pada masyarakat yang memungkinkan memudahkan dalam proses pembedaan antara bahasa yang benar dan bahasa yang tidak benar, bahasa orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Bahasa yang benar merupakan ciri ragam bahasa orang yang berpendidikan. Sejarah umum perkembangan bahasa telah menunjukkan bahwa ragam bahasa baku memperoleh gengsi dan wibawa yang tinggi karena ragam baku dipakai oleh kalangan kaum berpendidikan, yang kemudian menjadi pemuka diberbagai bidang kehidupan kemasyarakatan yang terpenting.

Di Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen, pembakuan bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting, selain sebagai gengsi dan wibawa suatu bangsa, juga sebagai

alat untuk memudahkan dalam komunikasi antarmasyarakat. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2010:14-16), pembakuan bahasa atau penentuan bahasa baku bahasa Indonesia mendukung empat fungsi, yaitu: (1) fungsi pemersatu, (2) fungsi pemberi kekhasan, (3) fungsi pembawa kewibawaan, dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Tiga fungsi pertama di antaranya hanya bersifat sebagai pelambang atau simbolik, sedangkan satu yang terakhir bersifat objektif.

Sebagai *fungsi pemersatu*, sebagaimana bunyi unsur ketiga dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sejak itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa baku yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol, bahasa Indonesia sebagai bahasa baku dapat memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa yang ada di Indonesia. Artinya, bahasa baku dapat mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur atau perorangan dengan seluruh masyarakat, sehingga melahirkan fungsi kedua bahasa baku, yaitu *pemberi kekhasan*.

Fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku dapat membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Bahasa baku dapat memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, kepemilikan bahasa baku dapat membawa serta wibawa atau *prestise* masyarakat penggunaannya.

Fungsi pembawa wibawa ini bersangkutan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa resmi dengan disyahkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia berkembang menjadi alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya.

Fungsi terakhir, yang bersifat objektif bahwa bahasa baku berfungsi sebagai *kerangka acuan*. Dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi secara jelas, akan dapat menjadi tolok ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa orang seorang atau golongan sehingga penyimpangan dari norma dan kaidah dapat dinilai.

3. Proses Pembakuan Bahasa

Moelyono (1985) mengungkapkan bahwa untuk memodernkan bangsa dan masyarakat, pemodernan bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting. Upaya pemodernan bahasa Indonesia telah ditandai dengan terbentuknya *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* dan diterbitkannya buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku bahasa Indonesia*. Sekalipun dua buku tersebut belum membahas tuntas aspek kebahasaan yang diharapkan, namun dengan terbitnya dua buku tersebut mengisyaratkan bahwa untuk kemantapan kedudukan bahasa Indonesia perlu dilakukan pembakuan bahasa, baik dalam bidang ejaan maupun tata bahasanya. Pembakuan ini dimaksudkan sebagai prasyarat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa keilmuan.

Dewasa ini, kemajuan bahasa Indonesia sebenarnya cukup menggembirakan dan banyak memberi harapan. Kata-kata baru mulai bermunculan dan menjadi berterima di masyarakat. Semua kata-kata baru tersebut dikembangkan oleh *Pusat Pembinaan Bahasa, ahli bahasa*, dan masyarakat pemakai bahasa yang mempunyai kesadaran bahasa atas dasar *perekayasaan bahasa*.

Perekayasaan bahasa merupakan proses penalaran yang digunakan dalam pengembangan istilah dan kosa kata. Perekayasaan tersebut, didasarkan pada memanfaatkan sarana morfologi bahasa Indonesia. Usaha perekayasaan bahasa dibidang keilmuan menurut Moelyono (1985) harus tetap dijabarkan dari strukturnya. Ketaatan akan menjadikan pemakaian yang seragam dalam hal sarana tata bahasa sehingga penafsiran akan seragam pula.

Pembakuan atau penstandaran bahasa dapat diselenggarakan oleh badan pemerintah yang resmi atau organisasi swasta. Di Amerika, misalnya, para penerbit mengeluarkan pedoman gaya tulis-menulis yang kemudian dianggap baku sebagai pedoman dan petunjuk dalam penulisan yang akan diterbitkan. Di Indonesia, ditunjuk badan pemerintah yang ditugasi menangani pembakuan bahasa, yaitu *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.

4. Problematika Pembakuan Bahasa Indonesia

“Bahasa menunjukkan bangsa” semboyan ini sebenarnya bukan sekedar ungkapan klise belaka, tetapi mempunyai makna filosofi yang sangat dalam. Sikap masyarakat terhadap bahasa, dapat dijadikan indikator mengenai sikap masyarakat dalam hidup bernegara. Sebagaimana konsep hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa merupakan penentu terhadap corak kebudayaan, sehingga bahasa mempengaruhi atau menentukan cara dan pola berpikir masyarakatnya.

Bila bahasa mempengaruhi kebudayaan dan pola berpikir masyarakat, maka ciri-ciri bahasa akan tercermin pada sikap dan budaya masyarakat penuturnya. Berkaitan dengan ini, secara gurauan ada cerita selorohan yang mengatakan karena dalam bahasa-bahasa barat (Inggris, Belanda, dan sebagainya) mengenal sistem kala (*tense*) dalam aturan kebahasaannya, maka orang barat sangat memperhatikan waktu. Mereka beraktivitas selalu menurut jadwal waktu. Pada musim panas, misalnya, pada pukul 21.00 matahari masih terang benderang, tetapi anak-anak mereka sudah disuruhnya tidur karena hari sudah dianggap larut malam. Sementara pukul 01.00, meskipun masih malam, ketika mereka saling bertemu, mereka akan saling menyapa "selamat pagi". Sementara dalam bahasa Indonesia yang tidak mengenal sistem kala (*tense*), mengakibatkan kebiasaan masyarakatnya yang sangat tidak memperhatikan waktu, acara yang sudah ditentukan waktunya bisa mundur satu atau dua jam atau bahkan lebih, sehingga dikenal istilah adanya "jam karet" dalam bahasa Indonesia.

Bahasa Inggris, yang kita kenal mempunyai aturan ejaan dan struktur bahasa yang benar-benar baku, sehingga mencapai status sebagai bahasa keilmuan, hal ini berpengaruh pada mentalitas sikap pemakaian bahasanya. Kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik tata bahasa maupun ejaannya merupakan suatu kesalahan yang dianggap 'tercela' dan memalukan, apalagi bila digunakan di kalangan akademik. Di Amerika Serikat, sudah menjadi kebiasaan umum dalam penilaian pekerjaan tulis pelajar dan mahasiswa, salah eja akan mengurangi skor pekerjaan tulis mereka. Bagaimana di Indonesia?

Kesadaran akan adanya pedoman yang baku dalam bahasa seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat mempunyai mentalitas untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan atau kesepakatan bersama. Memang, dalam setiap ketentuan yang baku atau standar selalu ada penyimpangan. Akan tetapi, penyimpangan tentu saja diharapkan sangat minimal. Bila penyimpangan lebih banyak dari ketentuan yang baku, berarti ketentuan yang baku tersebut praktis tidak ada manfaatnya sama sekali atau belum dapat dikatakan baku.

Secara tentatif dapat dikemukakan pendapat bahwa dalam proses pembakuan bahasa ada dua perangkat norma bahasa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berupa norma bahasa yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa yang dipergunakan di sekolah atau kalangan dunia pendidikan yang diajarkan pada siswa. Yang kedua norma berdasarkan adat pemakaian (*usage*) yang belum dikodifikasi secara resmi, secara umum dipakai di kalangan media massa dan sastrawan. Kedua norma ini di samping saling berbagi inti bersama, namun ada norma yang berlaku di sekolah, tetapi tidak diikuti oleh media massa atau sebaliknya sehingga dua norma ini dalam pemakaiannya bisa saling tumpang tindih.

Seandainya ada keinginan dan keyakinan bahwa bahasa Indonesia harus ditingkatkan dan dimodernkan agar memiliki kemantapan setingkat dengan bahasa yang sudah modern dan maju, maka siapakah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Merujuk pada konsep pembakuan bahasa di atas, maka jawabannya tentu saja, tidak hanya pada *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Semua yang terlibat dalam penggunaan bahasa mempunyai kewajiban untuk itu. Perguruan tinggi (khususnya dosen dan mahasiswa) merupakan *agent of development and agent of changes* yang sangat strategis.

Keefektifan usaha tersebut, tentunya juga akan dipengaruhi oleh sikap dan tanggapan para pemakai bahasa Indonesia. Komunikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia belum sepenuhnya mencapai titik kesepakatan yang tinggi dalam hal kesamaan pemahaman terhadap kaidah yang berlaku. Beberapa kenyataan dan faktor yang mempengaruhi pembakuan bahasa Indonesia menuju bahasa yang modern dan maju diungkapkan oleh Suwardjono (2004) dengan indikator para kalangan akademisi adalah sebagai berikut:

Pertama, para akademisi belajar bahasa Indonesia secara alamiah. Artinya orang belajar dari apa yang nyatanya digunakan tanpa memikirkan apa bentuk bahasa tersebut secara kaidah yang benar. Para akademisi kadangkala lebih menekankan pada *selera bahasa* daripada *penalaran bahasa*. Akibatnya, masalah kebahasaan Indonesia dianggap hal yang sepele dan dalam menanggapi masalah bahasa lebih banyak berargumen “yang penting tahu maksudnya”. Sikap mentalitas menerabas yang menurut Chaer (2002:17) tercermin dalam perilaku berupa adanya keinginan berbahasa Indonesia dengan baik tanpa melalui proses belajar. Sementara sebagian masyarakat kita, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bukan bahasa pertama (bahasa ibu). Untuk menguasai bahasa ibu saja kita harus belajar dari lingkungan kita, apalagi untuk menguasai bahasa kedua.

Kedua, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa asing (Inggris, dalam hal ini). Kenyataan ini tidak saja terjadi pada tingkat penggunaan bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga pada kalangan akademis. Sikap tuna harga diri, tercermin dalam perilaku berbahasa yang lebih menghargai bahasa asing dan menomorduakan bahasa sendiri. Mereka lebih nyaman menggunakan bahasa asing dalam komunikasi ilmiah tanpa ada upaya sedikitpun untuk memikirkan pengembangan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, belum merupakan kebanggaan atau gengsi bagi penuturnya. Sebagai contoh, demi pelayanan yang baik pada orang asing dan gengsi yang tinggi, keset-keset di muka pintu kantor pemerintah dan sekolah-sekolah bertuliskan ‘*WELCOME*’ bukan ‘*Selamat Datang*’. Di atas pintu-pintu bertuliskan ‘*EXIT*’ dan ‘*IN*’ bukan ‘*Keluar*’ dan

‘Masuk’, dan pintu-pintu kaca yang daunnya dapat dibuka dua arah bertuliskan ‘PUSH’ dan ‘PULL’ bukan ‘Tarik’ dan ‘Dorong’.

Ketiga, dalam dunia pendidikan (khususnya perguruan tinggi) sebagian buku referensi atau buku ajar yang memadai dan lengkap biasanya berbahasa asing (Inggris). Sementara itu, kemampuan berbahasa asing pelajar dan mahasiswa kita belum memadai. Kenyataan tersebut berimplikasi pada suatu keputusan *strategic implicit* sekolah mewajibkan setiap pelajar untuk fasih berbahasa Inggris, sehingga dalam kurikulum bahasa Inggris mempunyai kedudukan yang istimewa dibanding bahasa Indonesia. Bahkan ada sekolah yang mengharuskan komunikasi siswanya sehari-hari dengan bahasa Inggris.

Keempat, kalangan akademis sering telah merasa mampu berbahasa Indonesia, sehingga mereka merasa tidak perlu belajar bahasa Indonesia dan membuka kamus bahasa Indonesia. Aneh memang, orang sering merasa lebih asing mendengar bahasa sendiri daripada mendengar bahasa asing. Bila mereka menjumpai kata asing (Inggris) yang belum pernah dijumpainya, mereka penuh motivasi berusaha mengetahui artinya dengan membuka kamus tanpa terlintas dipikirkannya bahwa kata itu aneh. Akan tetapi, bila mereka mendengar kata bahasa Indonesia, justru sebaliknya dan tidak mau tahu apalagi membuka kamus. Sikap ini menunjukkan bahwa seseorang sudah merasa cukup dan puas dengan bahasa alamiahnya. Selain itu, dapat juga sikap semacam ini timbul karena mentalitas rendah diri atau *inferior* bangsa kita.

Kelima, adanya sikap sinis terhadap usaha-usaha pengembangan bahasa. Lebih dari itu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar belum merupakan suatu kebanggaan atau gengsi bagi penuturnya. Sikap tidak mau bertanggung jawab tercermin dalam perilaku berbahasa para tokoh kita yang tidak mau memperhatikan penalaran bahasa yang benar. Kita lihat saja bagaimana berbahasanya para anggota dewan kita pada saat berdebat dan diskusi yang ditayangkan media elektronik? Bukankah mereka seharusnya merupakan contoh figur-figur dalam pengembangan bahasa Indonesia baku? Bahkan dalam kenyataannya, suatu struktur bahasa yang baik dan benar sering menjadi olok-olok sehingga dalam suatu artikel sebuah majalah terkenal seorang penulis menganjurkan untuk mengganti *Pusat Pembinaan Bahasa* dengan *Pusat Pembinaan Bahasa*.

C. Kesimpulan

Bahasa mempunyai dampak yang luas dalam penyebaran maupun pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia jika dilihat dari struktur dan morfologi bahasa yang tersedia, sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi

bahasa yang maju dan modern sebagai bahasa keilmuan. Sikap negatif, seperti sikap meremehkan mutu, mentalitas menerabas, tuna harga diri, dan sikap tidak mau bertanggung jawab, juga apriori terhadap pengembangan bahasa merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan bahasa itu sendiri. Selain itu, ada pandangan yang beranggapan bahwa masalah bahasa Indonesia adalah masalah yang sepele, tidak perlu pembahasan lebih mendalam dalam pemakaiannya karena mereka berargumen dalam penggunaan bahasa '*yang penting tahu maksudnya*'. Belajar bahasa Indonesia cukup secara alamiah saja. Artinya, mereka belajar dari apa yang nyatanya digunakan tanpa memikirkan apa bentuk bahasa tersebut secara kaidah yang benar, sehingga dalam pemakaian mereka menekankan pada *selera bahasa* daripada *penalaran bahasa*.

Perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu sehingga perguruan tinggi tidak dapat melepaskan diri dari fungsinya sebagai pengembang bahasa Indonesia. Perguruan tinggi tidak harus tunduk pada apa yang nyata dipraktikkan, tetapi harus dapat mempengaruhi selera penggunaan bahasa yang adadalam masyarakat, sehingga proses pembakuan bahasa Indonesia benar-benar dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2002. *Pembakuan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti.1982.*Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende Flores: Nusa Indah.
- M.Moelyono, Anton.1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*.Jakarta: Djambatan.
- Nababan, P.W.J.1986, *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Suwardjono.2004.Aspek *Kebahasaan Indonesia dalam Karya Tulis Akademi/Ilmiah/Kesarjanaan*.www.suwardjono.com.